

Article

Evaluasi Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di PT. Pusri Studi Kasus Kabupaten Banyuasin

Muhammad Febrianza^{1*}, Marleni², Nopriawan Mahriadi³

¹²³Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Candradimuka Palembang

* *Correspondensi Penulis*: febryanza2543@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine the provision of subsidized fertilizer by the government in Banyuasin district to increase productivity and farmer income and a sustainable environment. This study is to evaluate the distribution of subsidized fertilizer. The research method uses a qualitative approach, the object of the Banyuasin district government, data collection, observation, interviews, documentation, conducted to the Banyuasin district government as a regulator, PT PUSRI, the provider of subsidized fertilizer policies as well as distributors of subsidized fertilizers and the community and farmers receiving subsidized fertilizers. The presentation of data is descriptive qualitative using the analysis of the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model theory by Stufflebeam. The results of the study indicate that the implementation of subsidized fertilizer distribution in Banyuasin Regency still requires improvement. The Context evaluation of the obstacles is not in accordance with the 6T principle of the right type, the right amount, the right price, the right place, the right time, and the right quality. The input for evaluating the source of funds in the procurement and distribution process is taken from the APBN funds and the PNBP Migas advances from the oil and gas profit sharing between the government. The distribution process of PT PUSRI that every farmer who wants to get subsidized fertilizer must have a Farmer Card. The impact of the product can be felt by farmers, the positive impact for farmers who have received the Farmer Card they feel no longer have difficulty in purchasing fertilizer, but the negative impact where the inequality of fertilizer recipients is caused by inaccurate data collection makes farmers buy fertilizer at commercial prices. In the process of conveying information by Banyuasin Regency in implementing the program, socialization is carried out evenly so that the public is aware of the policy regarding the procurement of subsidized fertilizer. For PT PUSRI, it is better to cooperate with the Ministry of Agriculture in updating data. Distribution of subsidized fertilizer can involve village or regional governments and law enforcement officers.*

Keywords: *Evaluation, Policy, Subsidized Fertilizer*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyaluran pupuk bersubsidi oleh pemerintah di kabupaten Banyuasin untuk meningkatkan produktivitas hasil dan pendapatan petani serta lingkungan yang berkelanjutan. Penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kegiatan distribusi pupuk bersubsidi. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif objek penelitian pemerintah kabupaten Banyuasin, pengumpulan data observasi wawancara dokumentasi, dilakukan ke pemerintah kabupaten Banyuasin sebagai regulator, PT PUSRI pemberi kebijakan pupuk subsidi sekaligus distributor pupuk subsidi dan masyarakat serta Petani penerima pupuk subsidi. Penyajian data secara diskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis teori model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) oleh Stufflebeam. Hasil dari penelitian menunjukkan pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Banyuasin masih memerlukan penyempurnaan. Evaluasi Context kendala belum sesuai dengan prinsip 6T tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Input evaluasi sumber dana dalam proses pengadaan dan penyalurannya diambil dari dana APBN serta talangan PNBP Migas berasal dari bagi hasil migas antara pemerintahan. Proses penyaluran pihak PT PUSRI bahwa setiap petani yang ingin mendapatkan pupuk subsidi wajib memiliki Kartu Tani. Produk dampaknya dapat diraskan oleh petani, dampak positifnya bagi petani yang sudah menerima Kartu Tani mereka merasa tidak kesulitan lagi dalam pembelian pupuk, namun dampak negatif dimana ketidakmerataan penerima pupuk disebabkan pendataan yang tidak tepat membuat petani membeli pupuk dengan harga komersil. Dalam proses penyampaian informasi oleh Kabupaten Banyuasin dalam pelaksanaan program melakukan sosialisasi secara merata agar masyarakat mengetahui adanya kebijakan mengenai pengadaan pupuk bersubsidi. Untuk PT PUSRI sebaiknya bekerjasama dengan Kementan dalam melakukan pemutakhiran data. Distribusi pupuk bersubsidi dapat melibatkan pemerintah desa atau wilayah dan aparat penegak hukum.

Kata Kunci: *Evaluasi, Kebijakan, Pupuk Bersubsidi*

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN 2686-2271 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Lambi,

PENDAHULUAN

Pupuk menjadi salah satu bentuk perwujudan kerja nyata dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan secara Nasional. Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia memberikan alokasi dana subsidi pupuk untuk para petani. Para petani membutuhkan pupuk untuk pertanian pokok seperti padi, jagung sawit dan lain-lain kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia. Pupuk merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan kesuburan dan peningkatan hasil produksi petani Indonesia. Pupuk memiliki peran yang sangat wajib dalam kehidupan petani, memelihara tanaman tidaklah cukup jika hanya dengan memberikan air saja, namun diperlukan juga pupuk yang terbaik membuat hasil tanaman sehat dan subur, karena pupuk merupakan asupan terbaik bagi tanaman. Pupuk sendiri memiliki banyak unsur hara yang terbukti baik untuk tanah, mulai dari jenisnya yang beragam dan bentuknya yang bervariasi mampu membuat tanaman hidup dengan baik, sebab fungsi pupuk sendiri merupakan sebagai perangsang pertumbuhan bagian dalam tanaman agar tanaman dapat tumbuh dengan kualitas yang baik. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian mengatur mengenai bagaimana pengadaan dan penyaluran pupuk hasil subsidi dari pemerintah yang pemanfaatannya digunakan untuk kebutuhan petani atas dasar program pemerintah di sektor pertanian.

Ketersediaan bahan pangan harus didukung oleh adanya sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Salah satu faktor yang memiliki peranan penting dan strategis dalam meningkatkan produksi serta produktivitas pertanian adalah pupuk. Dengan kemudahan para petani padi dalam mendapatkan pupuk tentu akan membuat petani termotivasi untuk meningkatkan hasil produksi padi dengan melaksanakan penanaman dan perawatan yang lebih baik. Ketiadaan pupuk di pasaran akan membuat petani mengalami kerugian karena hasil panen tidak akan maksimal bahkan tidak jarang karena kekurangan pupuk, tanaman padi tidak menghasilkan sebagaimana yang diharapkan oleh petani padi. Pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang subsidi pupuk sampai saat ini masih terus berjalan, dan diharapkan dapat memberikan dampak yang besar terhadap petani untuk membantu mengurangi beban biaya pupuk petani, oleh karena itu ketersediaan pupuk di pasaran merupakan syarat yang harus dapat dijamin oleh pemerintah, baik dari segi kuantitas, kualitas dan harga yang dapat dijangkau oleh petani.

Penetapan alokasi pupuk bersubsidi di tingkat kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu data spasial lahan milik petani, usulan alokasi pupuk dari kecamatan melalui E-RDCK dan alokasi pupuk bersubsidi kabupaten. Para petani penerima pupuk bersubsidi merupakan petani dengan luas lahan maksimal 2 hektar dan harus tergabung dalam kelompok tani. Sebagai bagian dari upaya dan dukungan terhadap Rencana Ketahanan Pangan Nasional pemerintah, PT PUSRI Indonesia merupakan anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia (Persero) tetap berkomitmen untuk menyalurkan pupuk bersubsidi secara aman kepada petani. Untuk itu, PT PUSRI memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditentukan pemerintah. Hal ini juga mengacu pada enam prinsip pemupukan yang benar, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Prinsip ini berlaku di seluruh tingkat saluran distribusi, hingga ke tingkat petani, yakni dari jalur I hingga jalur IV, kata Vice President (VP) Humas PT Pusri Soerjo Hartono. Pusri juga memastikan tidak ada penyalahgunaan atau kekurangan pupuk selama penyaluran subsidi pupuk. Oleh karena itu, sistem distribusi pupuk dilakukan secara tertutup dengan menggunakan mekanisme Kartu Tani (E-RDCK) yang dikelola Kementerian Pertanian. Penerapan sistem E-RDCK dapat meminimalisir kecurangan dan membuat penyaluran pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran. Hal ini juga mencegah duplikasi data penerima subsidi dan keterlambatan penerbitan keputusan.

(PUSRI 2020).

Penelitian Nahdah Iryani PT Pusri bertanggung jawab dalam melaksanakan distribusi dan pemasaran pupuk bersubsidi kepada petani sebagai bentuk pelaksanaan *Public Service Obligation* (PSO). Penelitian tersebut untuk mengetahui proses logistik pupuk bersubsidi wilayah Sumbagsel PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) memiliki beberapa rangkaian proses, diantaranya proses perencanaan produksi, *quality control*, proses penyimpanan dan sarana yang digunakan, *proses stock opname*, *proses* pengantongan pupuk, proses pemuatan pupuk, serta proses distribusi. Pada setiap proses tersebut, pengawasan menjadi faktor utama untuk mengantisipasi maupun mengurangi adanya penurunan kualitas pupuk dan kemasan pada pupuk. Penelitian Embang Herlambang Pupuk merupakan kebutuhan yang harus diprioritaskan, Permasalahan bagaimana pengaturan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan bagaimana optimalisasi pengawasan dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian terkait dengan Permen 4 Tahun 2023. Hasil penelitian pertama, pemerintah telah melakukan upaya Nasional untuk menciptakan kepastian hukum atas risiko pengadaan dan penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dengan cara yang harus menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian secara nasional pada alokasi yang merupakan temuan peraturan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, sistem distribusi pupuk harus dapat menjamin ketersediaan pupuk di tingkat petani melalui penerapan tujuh hak (jenis, jumlah, lokasi, mutu, waktu, sasaran, dan harga yang terjangkau oleh petani) guna mencegah terganggunya program peningkatan ketahanan pangan tingkat pusat dan daerah, serta diperlukan pengawalan pengawasan yang terkoordinasi dan menyeluruh oleh instansi terkait untuk penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Adapun novelty atau kebaruan pada penelitian ini terletak pada lokus dan fokus yang belum pernah diteliti oleh penulis lain yaitu lokus di kabupaten Banyuasin yang berfokus pada sektor pertanian sedangkan fokus menggunakan tori CIFF model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) oleh Stufflebeam.

Tabel 1.1
Jumlah Penyaluran Pupuk Bersubsidi

NO.	Jenis Pupuk	2020		2021		2022	
		Kebutuhan	Supply	Kebutuhan	Supply	Kebutuhan	Supply
1	UREA	37.963	37.178,75	27.784	20.732,50	21.468	19.700,40
2	NPK	18.298	18.273,95	20.094	13.642,55	18.604	15.021,80

Sumber: PT Pusri

Efektivitas penggunaan pupuk bersubsidi telah diarahkan kepada penggunaan pupuk yang berimbang, baik pupuk organik maupun pupuk non organik sesuai dengan rekomendasi spesifikasi lokasi dan standar teknis penggunaan pupuk yang memang sudah dianjurkan sesuai dengan peraturan pemerintah. Saifullah Lasindrang, Direktur Keuangan dan General Manager Palembang mengatakan penyaluran pupuk urea dan NPK dapat mendukung lima kabupaten, salah satunya Banyuasin.

Penyaluran pupuk bersubsidi yang diharapkan akan dapat disalurkan kepada petani secara merata dengan adanya sistem ERDKK dimana petani didaftarkan dalam e-Alokasi, pemerintah daerah kemudian mengeluarkan peraturan karena tanpa peraturan tersebut, gudang pupuk tidak dapat mendistribusikan barangnya ke distributor dan kios (PUSRI, 2020). Masalah pemenuhan kebutuhan pangan bagi semua penduduk dalam suatu wilayah dikarenakan pangan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup,

di tahun 2022 masalah kelangkaan pupuk yang dikutip oleh dalam berita harian tahun 2022, dimana dijelaskan bahwa rata-rata petani di Kabupaten Banyuasin mengeluh akan kelangkaan pupuk subsidi (Purwaningsih, 2018). Tak hanya itu, dalam berita harian dalam postingannya di jelaskan bahwa ditemukannya penyalahgunaan atau penyelewengan 29 ton pupuk subsidi oleh para oknum di Banyuasin, maka dari itu permasalahan ini menjadi sasaran utama bagi pemerintah agar tidak ada lagi petani yang merasa pupuk subsidi itu langka yang disebabkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari persoalan yang sudah dijelaskan di atas untuk penggunaan sistem E-RDKK belum cukup mampu mengatasi kelangkaan pupuk subsidi, sehingga pemerintah juga diharapkan dapat memberikan lebih banyak lagi tentang pengetahuan penggunaan sistem baru seperti E-RDKK guna untuk mendukung program yang saat ini sedang dijalankan, sehingga PTPUSRI Palembang juga dapat lebih mudah memastikan data penyaluran pupuk (Damayanti, 2021).

TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam proses implementasi kebijakan dan program. Melalui evaluasi akan diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan mana yang belum tercapai dari sebuah program. Informasi hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai bahan perbaikan program tersebut. Dengan kata lain evaluasi akan akan diketahui efektifitas, efisiensi, kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya sekaligus untuk meningkatkannya. Arti penting dari pelaksanaan kegiatan evaluasi adalah untuk melihat kembali apakah suatu program dan kebijakan pendidikan itu telah dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan perencanaan dan mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Dari hasil kegiatan evaluasi akan dapat diketahui hal-hal yang telah dicapai dan apakah suatu program dapat memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil evaluasi kemudian diambil keputusan apakah program dan kebijakan tersebut akan:



Sehingga dapat ditemukan tujuan, sasaran dan alternatif baru yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan akhir dari proses yang dimulai dari merumuskan, menguji, mengadopsi kebijakan, implementasi dan evaluasi. Evaluasi merupakan cara untuk mengetahui *outcome* kebijakan dan program. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson (Mais et al., 2019) secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

Teori CIPP Menurut Stufflebeam jenis evaluasi CIPP merupakan model yang cukup banyak diketahui dan dipakai oleh para evaluator. Oleh karena itu, uraian yang diberikan relatif panjang dibandingkan dengan model lainnya. Model CIPP ini dikembangkan oleh stufflebeam di *Ohion State university*. CIPP berasal dari sebuah singkatan dari huruf empat buat kata, yaitu Context Evaluation, Input Evaluation, Proses Evaluation, Product Evaluation. Keempat kata disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain ialah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Dengan kata lain, teori CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Dengan demikian, jika tim evaluator sudah menentukan model CIPP sebagai model yang akan digunakan untuk mengevaluasi program yang ditugaskan maka mau tidak mau mereka harus menganalisis terlebih dulu program tersebut berdasarkan komponennya (Sari et al., 2019).

METODE PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. dengan teknik analisis dan deskriptif, menurut Sugiyono (Nurdiani, 2014) metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang dialam dimana penelitim merupakan sebagai intrumen kunci, pengambilan sumber data secara purposiv dan snowball, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Dalam penelitian ini. Studi kejadian membahas kasus atau peristiwa tertentu yang benar-benar terjadi di masyarakat dan digunakan secara mendalam untuk mengkaji sejarah, kondisi, dan interaksi yang melingkupinya. Teknik studi kasus dalah metode penelitian kualitatif dimana penelitian dilakukan pada satu sistem yang berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok orang tertentu. Dalam penelitian ini, orang dan benda dijadikan sebagai sumber data. Orang berfungsi sebagai informan dalam arti bahwa mereka menyediakandata yang penelitikumpulkan, sedangkan objek adalah sumber data dalam bentuk bahan tertulis seperti artikel dan berita yang membantu peneliti mencapai tujuannya. Sugiyono (rukajar, 2021) menegaskan bahwa pengumpulan data merupakan tujuan utama analisis, maka prosedur pengumpulan data merupakan metode analisis yang paling strategis. Jika subjek tidak memahami metode pengumpulan data, mereka tidak akan bisa menerima data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh hasil penelitian Terapi Bekam Kering Dalam Mengatasi Migrain yang dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara.

JENIS DATA

Data yang digunakan dalam penelitian uni adalah data kualitatif dengan Jenis data yang dikelompokkan ke dalam data primer dan data sekunder

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan (Ardiansyah et al., 2023) .Adapun satuan pengamatan dari penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi Observasi yaitu salah satu metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengetahui secara langsung apa yang terjadi dilapangan. Seperti halnya yang dikatakan Poerwandri berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati (Bado, 2021).
- b. Dokumentasi Teknik dokumentasi dilakukan dengan mencari dokumen- dokumen yang mendukung penelitian yakni yang mengindikasi aktivitas PT. PUSRI di Sumatera Selatan. Penulis mengumpulkan dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen, baik dari dokumentasi resmi berupa surat keputusan, surat instruksi dan surat bukti kegiatan yang dilakukan. Selain itu penulis juga mengumpulkan informasi dari dokumentasi tidak resmi berupa surat nota, surat pribadi yang memberikan informasi kuat mengenai Program. Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan PT. PUSRI di Sumatera Selatan.
- c. Wawancara ini merupakan salah satu metode yang pengumpulan data penelitiannya dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada subjek yang nantinya akan berkontribusi secara langsung dengan objek yang diteliti. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui apa saja dari informan dan key informan. Penelitian dilakukan melalui wawancara pada informan terkait dengan Evaluasi Kebijakan Pengadaan Pupuk Bersubsidi di PT.PUSRI Palembang.

ANALISIS DATA

Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (Mouwn Erland, 2020) sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, merupakan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang

- tepat dan menentukan fokus pendalaman data pada proses pengumpulan data selanjutnya.
- b. Reduksi data, merupakan proses seleksi, memfokuskan, pengabstrakan, transformasi data yang ada dilapangan langsung dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, reduksi data dimulai sejak penelitian memfokuskan wilayah penelitian.
 - c. Penyajian data, rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data dapat diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau label.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai "Evaluasi Kebijakan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di PT. PUSRI Studi Kasus Kabupaten Banyuasin" yang telah peneliti temukan ketika Observasi dan Wawancara langsung dilapangan dengan menggunakan teori CIPP dimana model ini dikembangkan oleh stufflebeam. Model CIPP yang merupakan sebuah singkatan dari huruf awal empat buah kata, yaitu: Context, Input, Process and Product. Hingga terbentuklah teori model CIPP yakni: Konteks Evaluasi, Input Evaluasi, Proses Evaluasi, dan Produk Evaluasi yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Evaluasi Context Dari hasil wawancara dengan informan yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa faktor kendala dan hambatan dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani ini belum sesuai dengan prinsip yang sudah dibuat oleh pihak PT. PUSRI yaitu yang mengacu pada prinsip 6T yang diartikan tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Bisa dilihat dari sisi waktu, dimana terjadinya kedangkalan Sungai musi serta pada pendataan masih kurang efektif dan terkesan sangat rumit dan menyulitkan sehingga banyak waktu terbuang untuk hasil yang tidak optimal. Selain dari itu terdapat juga faktor pendukung dimana dengan adanya infastruktur seperti jalan TOL membuat proses penyaluran melalui darat bisa berjalan.
2. Input Dalam hal ini evaluasi input yang sumber dananya dalam proses pengadaan dan penyalurannya diambil dari dana APBN serta talangan PNBP Migas, dimana PNBP Migas berasal dari bagi hasil migas antara pemerintahan. Sedangkan untuk prosedur dan peraturannya dalam pembagian pupuk subsidi ini para petani wajib memiliki Kartu Tani yang sduah terdaftar di Kementan.
3. Proses Terkait penyaluran atau distribusi pihak PT. PUSRI dan Kementan telah mengatur bahwa setiap petani yang ingin mendapatkan pupuk subsidi wajib memiliki Kartu Tani. khusus pupuk subsidi untuk perencanaan produksi pupuk nantinya akan diatur oleh pihak Permentan dalam pengelolaan datanya. Petani mengumpulkan KK dan KTP kepada ketua kelompok tani untuk di daftarkan di kecamatan. Untuk petani yang mendaftar wajib memiliki maksimal 2 hektar lahan dengan jenis tanaman Pangan, Hortikular, dan Perkebunan dengan komoditas kopi, tebu, kakao. Jika sudah memiliki Kartu Tani, para petani dapat menebus pupuk subsidi dengan cara membawa Kartu Tani tersebut ke kios pengecer resmi, lalu menggesek Kartu Tani ke mesin EDC lalu petani dapal memasukan PIN sebagai dasar transaksi.
4. Produk dan Hasil Dalam hal ini dampaknya dapat diraskan oleh petani langsung, jika dilihat dari dampak positifnya bagi petani yang sudah menerima Kartu Tani mereka merasa tidak kesulitan lagi dalam pembelian pupuk. Namun jika dilihat dari dampak negatif yang dapat dirasakan oleh petani langsung, dimana ketidakmerataan penerima pupuk disebabkan pendataan yang tidak tepat membuat para petani harus membeli pupuk dengan harga komersil yang jauh lebih mahal dari pupuk yang dibeli dengan harga subsidi. Tetapi jika dilihat dari sebuah pencapaian dalam program ini bisa dikatan masih jauh dari kata berhasil, tapi jika dilihat dari perkembangan sebelum adanya subsidi bisa kita ketahui harga pupuk melonjak sehingga masyarakat khususnya petani sangat sulit mendapatkan kualitas pupuk yang bagus dan murah, namun semenjak adanya program pupuk bersubsidi ini sebagian petani sudah dapat merasakan mudah dan dapat mengurangi beban mereka dalam pembelian pupuk.

Evaluasi konteks membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang hendak dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program. Tujuan evaluasi konteks yang utama adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Dengan mengetahui

kekuatan dan kelemahan ini, evaluator akan dapat memberikan arah perbaikan yang diperlukan. Evaluasi konteks juga terkait dengan upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek (M, 1993). Sehingga peneliti menetapkan dua indikator yaitu hambatan dan tujuan.

1. Penghambat dan Pendukung. Program pengadaan dan penyaluran yang sudah berjalan ini termasuk belum bisa berjalan dengan optimal, bisa dilihat dari prinsip 6 Tepat yaitu, Tepat jenis, Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat tempat, Tepat waktu, dan Tepat mutu. Dimana hambatan dalam penyaluran dan pengadaan pupuk bersubsidi PT. PUSRI kedangkalan sungai musi sehingga pupuk sulit di kirim dalam jumlah banyak melalui kapal, serta kesulitan dalam memasukan data diri karena memang masih banyak data dari kependudukan dan catatan sipil tempat domisili tidak sinkron. Dalam situasi Sungai yang dangkal pihak PT. PUSRI memanfaatkan infastruktur seperti jalan TOL sehingga pupuk bisa dikirim melalui jalur darat.
2. Tujuan dari kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh PT. Pusri dapat membantu petani-petani di seluruh kawasan sumatera selatan khususnya Banyuasin agar bisa mendapatkan pupuk dengan mudah dan membantu menekankan biaya yang akan ditanggung petani dalam pembelian pupuk sehingga petani tidak merasa terbebani.

Evaluasi Input atau masukan membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa strategi mencapai tujuan dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Dalam hal ini komponen evaluasi input meliputi : strategi, prosedur dan peraturan, serta sumber dana atau anggaran

1. Sasaran Strategi. Pihak PT. PUSRI akan meminta atau bekerjasama dengan pihak kementan untuk kedepannya mendesain pola pendataan dengan lebih maksimal lagi, agar pembagian kartu tani dapat dibagikan secara merata, serta pihak PT. PUSRI akan terus mengevaluasi sistem Kartu Tani ini agar sesuai dengan prinsip yang sudah dibuat ialah 6 (enam) Tepat yaitu, Tepat jenis, Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat tempat, Tepat waktu, dan Tepat mutu.
2. Pengelolaan Sumber Dana, Prosedur dan Peraturan. Dalam hal pendanaan pupuk bersubsidi ini yang bersumber pembiayaan subsidi berasal dari APBN selain itu dana bersumber talangan PNPB Migas, dimana prosedur dan peraturan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi petani wajib mendaftarkan dirinya ke masing-masing ketua kelompok taninya agar di daftarkan nantinya di melalui kecamatan lalu ke pihak Kementan, lalu petani wajib memiliki maksimal 2ha lahan dengan jenis tanaman pangan, hortikultura, serta Perkebunan seperti kopi.

Evaluasi Proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap imlementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Pada dasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki. Evaluasi proses dalam model CIPP menunjukkan pada "apa" (what) kegiatan yang dilakukan dalam program, "siapa" (who) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, "kapan" (when) kapan kegiatan akan selesai.

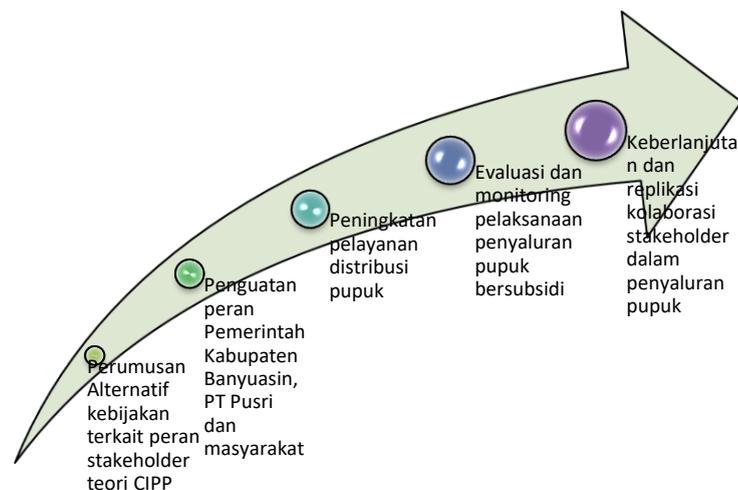
A. Alur Pelaksanaan

1. Khusus pupuk subsidi untuk perencanaan produksi pupuk nantinya akan diatur oleh pihak Permentan dalam pengelolaan datanya.
2. Petani mengumpulkan KK dan KTP kepada ketua kelompok tani untuk di daftarkan di kecamatan
3. Untuk petani yang mendaftar wajib memiliki maksimal 2 hektar lahan dengan jenis tanaman Pangan, Hortikular, dan Perkebunan dengan komoditas kopi, tebu, kakao.
4. Jika sudah memiliki Kartu Tani, para petani dapat menebus pupuk subsidi dengan cara membawa Kartu Tani tersebut ke kios pengecer resmi, lalu menggesek Kartu Tani ke mesin EDC lalu petani dapal memasukan PIN sebagai dasar transaksi

Evaluasi produk diharapkan dapat membantu pimpinan proyek ataupun Pemerintah untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kelanjutan, akhir maupun modifikasi program. Evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat ketercapaian dan keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

1. Dampak. Dampak positif bagi petani yang sudah menerima Kartu Tani mereka merasa tidak kesulitan lagi dalam pembelian pupuk. Dampak negative, sedangkan dalam hal ini dampak negative yang dapat dirasakan oleh petani langsung, dimana ketidakmerataan penerima pupuk disebabkan pendataan yang tidak tepat .
2. Pencapaian. Pencapaian dilihat dari perkembangan sebelum adanya subsidi bisa kita ketahui harga pupuk melonjak sehingga masyarakat khususnya petani sangat sulit mendapatkan kualitas pupuk yang bagus dan murah, namun semenjak adanya program pupuk bersubsidi ini Sebagian petani sudah dapat merasakan mudah dan dapat mengurangi beban mereka dalam pembelian pupuk.

Melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait tata kelola dan pengembangan penyaluran pupuk bersubsidi di kabupaten Banyuasin dengan teori CIPP dengan konsep kota berkelanjutan dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Adapun alur rekomendasi penelitian terdapat dibawah ini:



PENUTUP

Kesimpulan

1. Dilihat dari Evaluasi Context Dari hasil wawancara dengan informan yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa faktor kendala dan hambatan dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani ini belum sesuai dengan prinsip yang sudah dibuat oleh pihak PT. PUSRI yaitu yang mengacu pada prinsip 6T yang diartikan tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu Bisa dilihat dari sisi waktu, dimana terjadinya kedangkalan Sungai musi serta pada pendataan masih kurang efektif dan terkesan sangat rumit dan menyulitkan sehingga banyak waktu terbuang untuk hasil yang tidak optimal. Selain dari itu terdapat juga faktor pendukung dimana dengan adanya infastruktur seperti jalan TOL membuat proses penyaluran melalui darat bisa berjalan.
2. Dilihat dari Input Dalam hal ini evaluasi input yang sumber dananya dalam proses pengadaan dan penyalurannya diambil dari dana APBN serta talangan PNBP Migas, dimana PNBP Migas berasal dari bagi hasil migas antara pemerintahan. Sedangkan untuk prosedur dan peraturannya dalam pembagian pupuk subsidi ini para petani wajib memiliki Kartu Tani yang sudah terdaftar di Kementan.
3. Dilihat dari Proses Terkait penyaluran atau distribusi pihak PT. PUSRI dan Kementan telah

mengatur bahwa setiap petani yang ingin mendapatkan pupuk subsidi wajib memiliki Kartu Tani. khusus pupuk subsidi untuk perencanaan produksi pupuk nantinya akan diatur oleh pihak Permentan dalam pengelolaan datanya. Petani mengumpulkan KK dan KTP kepada ketua kelompok tani untuk di daftarkan di kecamatan. Untuk petani yang mendaftar wajib memiliki maksimal 2 hektar lahan dengan jenis tanaman Pangan, Hortikular, dan Perkebunan dengan komoditas kopi, tebu, kakao. Jika sudah memiliki Kartu Tani, para petani dapat menebus pupuk subsidi dengan cara membawa Kartu Tani tersebut ke kios pengecer resmi, lalu menggesek Kartu Tani ke mesin EDC lalu petani dapat memasukan PIN sebagai dasar transaksi.

4. Dilihat dari Produk/Hasil Dalam hal ini dampaknya dapat diraskan oleh petani langsung, jika dilihat dari dampak positifnya bagi petani yang sudah menerima Kartu Tani mereka merasa tidak kesulitan lagi dalam pembelian pupuk. Namun jika dilihat dari dampak negatif yang dapat dirasakan oleh petani langsung, dimana ketidakmerataan penerima pupuk disebabkan pendataan yang tidak tepat membuat para petani harus membeli pupuk dengan harga komersil yang jauh lebih mahal dari pupuk yang dibeli dengan harga subsidi. Tetapi jika dilihat dari sebuah pencapaian dalam program ini bisa dikatakan masih jauh dari kata berhasil, tapi jika dilihat dari perkembangan sebelum adanya subsidi bisa kita ketahui harga pupuk melonjak sehingga masyarakat khususnya petani sangat sulit mendapatkan kualitas pupuk yang bagus dan murah, namun semenjak adanya program pupuk bersubsidi ini sebagian petani sudah dapat merasakan mudah dan dapat mengurangi beban mereka dalam pembelian pupuk.

Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan internal Kabupaten Banyuasin dan PT PUSRI, maupun kepentingan eksternal khususnya bagi kalangan peneliti berikutnya yang tertarik dengan tema sejenis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritik dan praktis.

1. Dalam proses penyampaian informasi yang disampaikan oleh Kabupaten Banyuasin terkait sebagai stakeholder dalam pelaksanaan program tersebut melakukan sosialisasi secara merata agar masyarakat khususnya kelompok sasaran mengetahui adanya kebijakan mengenai pengadaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh PT. PUSRI.
2. Untuk PT. PUSRI sebaiknya mampu bekerjasama dengan Kementan dalam melakukan pemutakhiran data para petani, karena permasalahan ini tidak hanya dikarenakan dari pengiriman melainkan juga dari data petani yang masih belum sinkron sehingga masih banyak petani yang belum menerima kartu tani.
3. Untuk harapan kedepan pendistribusian pupuk bersubsidi oleh pihak PT. PUSRI ini juga dapat melibatkan pemerintah desa atau wilayah dan aparat penegak hukum, agar jika suatu saat ditemukan adanya pemalsuan data maupun ketidaksesuain dalam sistem penyaluran maka dapat segera dimintakan pertanggungjawaban kepada pemerintah desa atau wilayahnya.
4. Secara teoritis penelitian ini pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang administrasi publik. Menjadi acuan dan khasanah ilmu pengetahuan tentang administrasi publik khususnya pada aspek kepemimpinan, kebijakan publik dan pengambilan keputusan dan kinerja pemerintahan. Memperdalam pemahaman teoritis tentang efektifas gaya kepemimpinan dalam konteks birokrasi sesuai dengan pengkajiannya. Mengembangkan dan melahirkan konsep dan teori baru tentang model pelaksanaan pemeritahan sebagai hasil empiris yang berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya disiplin administrasi publik.
5. Secara praktis sebagai bahan masukan kepala daerah khususnya dalam penyelenggaraa pemerintahan dan pembangun di provinsi sumatera selatan. Menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangun di provinsi sumatera selatan. Penambahan fakta ilmiah yang dijadikan sumber informasi tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah ditinjau dari gaya kepemimpinan dan kinerja kepala daerah. Pengembangan penelitian lebih lanjut terkait dengan gaya kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pembangunan di provinsi sumatera selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani. (2022). Komisi IV Peringatkan Kementan Soal Penanganan Penyelewengan Pupuk Bersubsidi. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/468912/komisi-ivperingatkan-kementan-soal-penanganan-penyelewengan-pupuk-bersubsidi>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Bado, B. (2021). Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah. In *Pengantar Metode Kualitatif*.
- Benny Rachman. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Distribusi Dan Harga Pupuk Di tingkat Petani. <https://media.neliti.com/media/publications/54313-IDevaluasi-kebijakan-sistem-distribusi-dan.pdf> BPK. (2003). Kementerian Perdagangan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/128630/permendag-no-70-tahun-2019>
- Damayanti, E. N. (2021). Pengaruh dan strategi kebijakan pupuk bersubsidi terhadap peningkatan produktivitas pad. In *Tesis: FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61198/2/ERISCA> NOVRIANA DAMAYANTI-FST1.pdf
- Defita, I., & Dr. Eny Winaryati, M. P. (2021). E-Book Model Evaluasi, Aplikasi dan Kombinas.
- Dr. Ambiyar, M. pd., & D, Dr. Muharika., S. M. pd. . (2019). BUKU METODOLOGI PENELITIAN EVALUASI PROGRAM-MUHARIKA FIX. ALFABETA, cv. [file:///C:/Users/FPD/Downloads/BUKU METODOLOGI PENELITIAN EVALUASI PROGRAM-MUHARIKA FIX.pdf](file:///C:/Users/FPD/Downloads/BUKU%20METODOLOGI%20PENELITIAN%20EVALUASI%20PROGRAM-MUHARIKA%20FIX.pdf)
- Dr. Muhadjir Darwin, M. (n.d.). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (William N. Dunn) (Z-Library). *Humaniora*. (2022). Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian. <https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-datadan-metode-penelitian>
- M, D. W. (1993). *model evaluasi, measurement, assessment, evaluation*.
- Mais, R., Liando, D., & Pangemanan, F. (2019). Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Reward dan Punishment Aparatur Sipil Negara di Kota Bitung. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–9. <https://media.neliti.com/media/publications/103420-ID-pengaruh-aksesoris-dan-elemen-pembentuk.pdf>
- Muh. Fruyal Akbar, S.IP., M. S., & Widya Kurniati Mohi, S.IP., M. S. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Kebijakan Di Indonesia) (Issue March).
- Mouwn Erland. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Rake Sarasini* (Issue March).
- Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5(2), 1110. <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>
- Oskandar, D. (2022). Al okasi Pupuk Subsidi Muba Turun Drastis. <https://www.rmolsumsel.id/alokasi-pupuk-subsidi-muba-turun-drastis>
- Pusri, K. (2020). Pusri Pastikan Penyaluran Pupuk Sesuai Ketentuan. [https://www.pusri.co.id/id/news/detail/pusri-pastikan-penyaluran-pupuk-sesuai-ketentuan#:~:text=Dalam menjalankan kegiatan pengadaan dan,tepat waktu%2C dantepat mutu.](https://www.pusri.co.id/id/news/detail/pusri-pastikan-penyaluran-pupuk-sesuai-ketentuan#:~:text=Dalam%20menjalankan%20kegiatan%20pengadaan%20dan,tepat%20waktu%20dan%20tepat%20mutu.)
- Purwaningsih, Y. (2018). ketahanan pangan: Situations, Problems, Policies and Community Empowerment. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 1–27.
- Ramlayana. (2020). Efektifitas Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Para Petani Padi di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. *Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar*, 1(4).

- https://journal.unismuh.ac.id/index.php/ki_map/index Rizal
- Rukajar. (2021). Kesalahan Berbahasa Pada Penulisan Media Luar Ruang Di Barus Tapanuli Tengah. *Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 1(2), 2775–4693.
- Sari, D. P., Islamiati, S. H. D., Nugraha, M. S., Meishanti, O. P. Y., Latief, S., Pohan, R., Djafri, N., Rahmat, A., Liriwati, F. Y., Aliya, R. R., Harini, S., Saryanto, & Krismanto, W. (2019). Manajemen Pendidikan. *Gorontalo: Ideas Publisng*, 1–186.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D Sugiyono. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046>
- Sulaksono, T. P. (2017). Kontribusi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pengembangan Perspektif Lintas Budaya Siswa. 41–49.
- Sularno, Bambang Irawan, N. H. (n.d.). Analisis Pelaksanaan Kebijakan & Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Karawang Jawa Barat.
- Togimin. (2023). Pendampingan Penyusunan E-RDCK Menggunakan Teknologi Google Form pada Gapoktan “Rejo Mulyo” Desa Rejoagung, Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso. <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/Perigel/article/view/878>
- Umar. (2014). Perbedaan Data Primer dan Sekunder dalam Penelitian. <https://kumparan.com/perbedaan-kata/perbedaan-data-primer-dan-sekunder-dalam-penelitian-20gQFLeuSfD/full>
- Wahyu,E. (2019). Kajian Teori Evaluasi CIPP. 9–33. Wibawa, S. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik, Jakarta. In Raja Grafindo Perkasa (Vol. 1, Issue 54).